



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MANEGER NASUTION
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 686299

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.640.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 366 m²/200 m² di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.515.000.000
2. Tanah Seluas 6312 m² di PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000
3. Tanah Seluas 17884 m² di PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 379.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G.AT Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SE-88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
4. MOTOR, HONDA NC II DI CF. A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
5. MOTOR, YAMAHA B67 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.770.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 57.258.625**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.136.028.625



III. HUTANG

Rp. 36.767.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.099.261.125

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.